

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh Pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, maupun latihan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi akademis dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik agar dapat mempersiapkan dirinya di masa mendatang. Pada hakikatnya tujuan pendidikan harus dicapai melalui proses belajar mengajar. Pendidikan meliputi seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diupayakan secara sadar dan sungguh-sungguh, yang meliputi upaya pembinaan tahap demi tahap untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan dan pendayagunaan secara efektif dan efisien semua sumber materi dan non materi, terutama dalam pengajaran dan proses pembelajaran serta dalam pendidikan pada umumnya. Pendidikan merupakan upaya mempersiapkan peserta didik untuk hidup bermasyarakat dengan baik serta mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsanya. (Sahlan, 2010: 1).

Dalam konteks ini, layanan pendidikan yang merata di antara semua bangsa dipandang perlu untuk diciptakan dan ditingkatkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang menjelaskan bahwasanya pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan dan mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia. UUD 1945 mewajibkan pemerintah Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dikenal dengan Sistem Pendidikan Nasional, yang diatur dengan UU No. 20 tahun 2003.

Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 1, menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Wahyuningsih (2020: 22) yang mengatakan bahwa pendidikan adalah dasar utama yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa.

Dengan kemauan yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan nasional, maka kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang akan lebih cerah dan maju. Tujuannya agar para siswa mampu mengembangkan potensi diri mereka secara aktif selama proses memperoleh kekuatan dan kesadaran spiritual beragama, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya sistem pendidikan nasional, harapannya bisa terwujud pemerataan kesempatan dalam pendidikan di Indonesia, peningkatan mutu, serta kesesuaian dan efisiensi manajemen pendidikan dalam era globalisasi dan peningkatan teknologi yang kompetitif saat ini dapat melakukan perbaikan terus menerus dalam pembentukan keunggulan yang berdaya saing tinggi, untuk terus berkembang dan maju.

Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap bangsa dan negara karena dalam kondisi apapun manusia tidak akan dapat menolak efek dari penerapan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat Pemerintah dituntut harus mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Berbagai permasalahan terkait kondisi pendidikan di Indonesia menjadi fokus dan prioritas utama Pemerintah dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia tersebut seperti pemerataan, mutu dan relevansi, serta efisiensi dan efektivitas pendidikan itu sendiri.

Permasalahan yang paling sering terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah mengenai pemerataan akses dan mutu pendidikan. Persebaran sekolah, guru, dan fasilitas pendidikan yang belum merata terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah khususnya pada satuan pendidikan sehingga pemerintah harus selalu melakukan berbagai program transformasi dan kebijakan yang berkelanjutan agar dapat memecahkan permasalahan terkait peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Sangat penting

untuk dipahami bahwa sistem pendidikan nasional kita umumnya berada dalam kategori sistem dengan kinerja di bawah rata-rata dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik. Hal ini didapatkan dari hasil penilaian yang berlaku di dunia, seperti PISA, TIMSS, dan sebagainya, maka penting sekali untuk dapat mengidentifikasi isu-isu kunci yang perlu diantisipasi untuk meningkatkan hasil pendidikan. Oleh sebab itulah banyak negara dengan sistem kinerja di bawah rata-rata perlu membangun kapasitas instansi untuk melakukan reformasi sistem yang lebih baik dan menyeluruh (World Bank, 2018b).

Citra mutu pendidikan Indonesia yang kurang berkembang memicu berbagai program dan kebijakan di tingkat nasional. Upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan dengan mendirikan sekolah bermutu di berbagai daerah antara lain Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Rujukan, dan Sekolah Model dan yang saat ini sedang digencarkan adalah Sekolah Penggerak dengan harapan Ketika bertumbuhnya sekolah yang berkualitas di suatu wilayah, maka akan dapat menjadi contoh bagi sekolah lain di sekitarnya. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan di atas dapat mendorong terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu, namun tidak berdampak luas dan merata. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memprakarsai pembentukan program Sekolah Penggerak untuk melanjutkan dan mengembangkan strategi peningkatan mutu pendidikan agar lebih merata ke lebih banyak sekolah dan daerah.

Sesuai Permendikbud Nomor 1177/M Tahun 2020, sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia. Sekolah Penggerak fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara menyeluruh melalui penerapan profil siswa Pancasila yang meliputi kompetensi dan karakter, mulai dari SDM kepala sekolah dan guru yang unggul, serta tersedianya sumber daya sarana dan prasarana sekolah.. Sekolah penggerak memiliki tugas untuk dapat menggerakkan level atau tahapan hasil belajar di atas level yang diharapkan oleh pemerintah di sekolahnya serta melakukan pengimbasan di sekolah negeri dan swasta lainnya yang berada di sekitarnya agar dapat tumbuh dan berkembang bersama dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan yakni peningkatan dan pemerataan akses pelayanan dan mutu pendidikan. Program ini bertujuan untuk mendorong sekolah-sekolah secara

mandiri melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara internal dan kemudian membandingkannya dengan sekolah lain untuk meningkatkan kualitas yang serupa. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang juga bertugas sebagai pemerintah daerah yang turut menyukseskan program sekolah penggerak ini khususnya pada tingkat SMA, juga selalu berupaya untuk memenuhi berbagai persyaratan penunjang yang dibutuhkan demi berjalannya program tersebut. Adapun jumlah sekolah penggerak yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada SMA di Provinsi Sumatera Barat adalah seperti data pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Daftar SMA Pelaksana Program Penggerak di Sumatera Barat

No	Nama Sekolah	Kab/ Kota
1	SMAN 2 Padang	Kota Padang
2	SMAN 3 Padang	Kota Padang
3	SMAN 7 Padang	Kota Padang
4	SMAN 8 Padang	Kota Padang
5	SMAN 9 Padang	Kota Padang
6	SMAN 10 Padang	Kota Padang
7	SMAN 13 Padang	Kota Padang
8	SMAN 15 Padang	Kota Padang
9	SMAN 1 Suliki	Kab. Lima puluh kota
10	SMAN 1 Akabiluru	Kab. Lima puluh kota
11	SMAN 1 Tilatang Kamang	Kab. Agam
12	SMAN 1 Candung	Kab. Agam
13	SMAN 1 Palembayan	Kab. Agam
14	SMAN 1 Timpeh	Kab. Dharmasraya
15	SMAN 1 Pulau Punjung	Kab. Dharmasraya
16	SMAN 1 Harau	Kab. Lima puluh kota
17	SMAN 1 Kec. Payakumbuh	Kab. Lima puluh kota
18	SMAN 1 Guguak	Kab. Lima puluh kota
19	SMAN 1 Situjuh Limo Nagari	Kab. Lima puluh kota
20	SMAN 1 Bayang	Kab. Pesisir Selatan
21	SMAN 1 Pancung Soal	Kab. Pesisir Selatan
22	SMAN 2 Lintau Buo	Kab. Tanah Datar
23	SMAN 3 Solok Selatan	Kab. Solok Selatan
24	SMAN 3 Sawahlunto	Kota Sawahlunto
25	SMAS Excellent Nurul Ikhlas	Kota Padang Panjang

Sumber : Data Bidang PSMA Disdik Sumbar 2021-2022.

Dari data di atas terlihat bahwa sekolah penggerak yang paling terbanyak terdapat pada wilayah Kota Padang yakni 8 Sekolah Penggerak. Sekolah tersebut adalah SMAN 2 Padang, SMAN 3 Padang, SMAN 7 Padang, SMAN 8 Padang, SMAN 9 Padang, SMAN 10 Padang, SMAN 13 Padang dan SMAN 15 Padang. Sebagai sekolah penggerak, sekolah tersebut harus melaksanakan tugas sekolah penggerak yang dibebankan kepada sekolah untuk dapat mendukung dan mensukseskan program tersebut.

Salah satu tugas sekolah penggerak adalah sekolah tersebut harus mampu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolahnya serta berupaya mendorong sekolah-sekolah lain di sekitarnya untuk ikut melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di lingkup internal, kemudian mendorong sekolah-sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa. Program sekolah penggerak juga diharapkan dapat menyukseskan terselenggaranya kurikulum merdeka yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Secara sederhana kurikulum merdeka bertujuan untuk menciptakan kemerdekaan dalam belajar, dimana peserta didik berhak untuk lebih mendalami mata pelajaran yang digemarinya. Kesuksesan berbagai program yang tengah digencarkan oleh pemerintah tersebut tentunya tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut.

Sebagai sekolah penggerak, sekolah harus mampu menciptakan berbagai inovasi yang mampu mencetak siswa berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi agar dapat tumbuh setara dengan kualitas pendidikan pada negara maju lainnya. Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah tersebut tentunya juga tidak akan dapat tercapai ketika ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam proses belajar mengajar tersebut tidak sesuai standar, tidak layak dan tidak memadai. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur pentingnya sarana dan prasarana guna menunjang proses pendidikan, diatur oleh , BAB XII pasal 45: (1) Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta

didik; dan (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB VII pasal 42 ayat 1 dan 2 menyatakan: (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapanyang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan (2) Setiap satuan pendidikan meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang Tata Usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat olahraga, dan tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang harus dimiliki dan dikelola dengan baik oleh sekolah, seperti gedung, tanah, peralatan administrasi dan fasilitas yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Sarana dan prasarana pendidikan sebagai salah satu unsur manajemen pendidikan yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar, lembaga pendidikan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena peranannya dapat memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi belajar mengajar sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Keterbatasan sarana dan prasarana belajar mengajar di sekolah tentunya akan mempengaruhi hasil belajar. Dengan kata lain proses pelaksanaan pendidikan di sekolah dan permasalahan pembelajaran bukan hanya dihadapi oleh guru yang bersangkutan, tetapi didukung pula oleh keberadaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan tersebut.

Sarana juga sering dikenal sebagai pengelolaan materiil, atau pengelolaan peralatan yang berarti keseluruhan proses penataan yang berkaitan dengan pengadaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana pendidikan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Klasifikasi fasilitas fisik atau fasilitas materiil dalam kegiatan pendidikan antara lain: Perabotan ruang kelas, perabot kantor tata usaha, perabot dan peralatan laboratorium, perlengkapan perpustakaan, perlengkapan ruang praktik, dan sebagainya (Arikunto, 1993:82).

Proses Belajar Mengajar (PBM) atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) akan lebih berhasil apabila didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, oleh karena itu pemerintah senantiasa berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan tingkat pendidikan sehingga kemakmuran materi berupa lembaga pendidikan dan infrastruktur menjadi sangat besar di negeri ini. (Gunawan 1996:114). Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 yang mengatur tentang keberadaan sarana dan prasarana pendidikan, menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, intelektual, dan mental peserta didik.

Salah satu yang menjadi sumber daya penting sebagai penunjang proses pembelajaran di sekolah adalah sarana dan prasarana pendidikan. Keadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah secara signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan program-program Pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat dicapai apabila Proses Belajar Mengajar (PBM) atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berjalan dengan lancar. Kesuksesan PBM dan KBM sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai terlebih pada sekolah penggerak yang bertugas untuk memperbaiki kualitas mutu pendidikan sekolahnya dan penggerak bagi sekolah lainnya.

Keberadaan sarana prasarana pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dalam menyukseskan program tersebut. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah sangat mempengaruhi kemampuan guru dalam mengajar dan kemampuan siswa dalam menerima pembelajaran sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan efisien. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi faktor sangat penting dalam menunjang kualitas belajar dikarenakan tanpa sarana dan prasarana yang layak dan memadai proses pembelajaran tersebut tidak akan berjalan dengan lancar bahkan dapat menjadi penyebab gagalnya tujuan pendidikan itu sendiri (Gunawan, 1996: 114).

Mulai diterapkannya kurikulum merdeka belajar terutama dimulai pada sekolah penggerak yang merupakan sekolah yang akan menjadi percontohan dalam hal peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menggerakkan sekolah lainnya untuk dapat tumbuh dan maju bersama membuat seluruh *stakeholders* di sekolah harus bekerjasama secara ekstra dalam mewujudkan program tersebut. Penerapan kurikulum merdeka yang sudah dimulai dari tahun 2021 membuat sekolah penggerak yang dalam hal ini masih belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai kesulitan dalam mensukseskan penyelenggaraan program tersebut.

Belum meratanya fasilitas pendidikan di sekolah terutama pada beberapa sekolah penggerak di Kota Padang menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan percepatan program pemerataan akses layanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berupaya terus melakukan pendataan, perencanaan hingga penyusunan anggaran guna memenuhi kebutuhan usulan sarana dan prasarana sekolah yang salah satunya pada tingkat Sekolah Menengah Atas oleh bidang Pembinaan SMA. Terlebih lagi, alokasi anggaran bantuan peningkatan sarana dan prasarana yang dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan melalui Dana DAK sangat terbatas, sementara jumlah kebutuhan sarana dan prasarana SMA masih sangat banyak seperti yang terlihat dari data di bawah ini :

Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA Provinsi Sumatera Barat.

No	Tahun	Jumlah Usulan Kebutuhan Sarpras dari Sekolah	Jumlah alokasi sekolah penerima DAK
1	2019	193 sekolah	83 Sekolah
2	2020	221 sekolah	110 Sekolah
3	2021	128 sekolah	16 Sekolah
4	2022	137 sekolah	23 Sekolah

Sumber: Data Seksi Sarpras SMA tahun 2021-2022

Dari data di atas terlihat adanya keterbatasan jumlah alokasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melalui dana DAK untuk program peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Besarnya jumlah usulan kebutuhan sekolah tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kebutuhan sekolah, sehingga sekolah sebagai satuan pendidikan harus mampu secara mandiri mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Banyaknya jumlah sekolah yang masih belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana maupun sekolah yang meskipun telah memiliki ketersediaan sarana dan prasarana akan tetapi sudah tidak layak lagi dan memerlukan perbaikan tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan terlebih pada sekolah penggerak di Kota Padang. Jumlah alokasi anggaran yang terbatas dan tidak seimbang dengan banyaknya data jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh pemerintah membuat terjadinya perebutan bantuan dari pihak sekolah untuk mempercepat peningkatan sarana dan prasarana di sekolahnya masing-masing. Manajemen sekolah yang mulanya terpusat, kini juga didelegasikan ke sekolah termasuk manajemen sarana dan prasarannya.

Dalam hal ini, penting bagi pihak sekolah untuk secara mandiri dapat mengelola dan mengurus kepentingan sekolah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Martin dan Fuad, 2016: 3). Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah juga menjadi tolak ukur kemajuan pengembangan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut harus mampu diupayakan oleh sekolah guna menunjang keberhasilan program peningkatan kualitas mutu pendidikan terutama pada SMA Penggerak di Kota Padang.

Keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan terutama pada sekolah penggerak tergantung dari bagaimana sekolah mampu membangun kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang terdapat di

sekolah maupun di luar sekolah. Keberhasilan sekolah dalam mengembangkan kerjasama tersebutlah yang akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah harus memiliki berbagai strategi yang baik untuk melakukan berbagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan tersebut yang direfleksikan dalam bentuk sumber daya manusia yang mampu mengelola sekolah tersebut agar berkembang menjadi sekolah yang lebih maju yang dalam hal ini diperankan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu melihat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan berbagai kendala yang menghambat tujuan pendidikan salah satunya adalah permasalahan terkait fasilitas pendukung utama dalam pendidikan yakni sarana dan prasarana seperti yang tergambar dalam bentuk diagram sebagai berikut :



Gambar 1.1: Pengembangan kualitas pendidikan (Usman, 2014: 87)

Sekolah harus memiliki sumber daya yang potensial yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut yang dalam hal ini permasalahan sarana dan prasarana. Kepala sekolah sebagai ujung tombak pada lembaga pendidikan tersebut harus berupaya memaksimalkan berbagai sumberdaya yang dimiliki guna mencari bantuanpeningkatan sarana dan prasarana ke berbagai pihak untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah tersebut yang salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan modal sosial.

Pendayagunaan modal sosial dalam pendidikan dapat dimanfaatkan dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas. Konsep modal sosial dalam

pendidikan diawali tentang kualitas dan mutu pendidikan serta faktor-faktor penting

yang perlu diperhatikan dalam mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh infrastruktur, sumber daya, dan tata kelola akademik yang baik saja, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi-relasi sosial lainnya. Faktor ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki sekolah juga dapat mempengaruhi berbagai kebijakan dalam pendidikan karena diyakini sangat menentukan kualitas dan output pendidikan di sekolah (Usman, 2018: 74).

Kebijakan dalam pendidikan akan memperoleh keberhasilan apabila didukung dengan modal sosial. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang secara langsung melaksanakan berbagai bentuk kebijakan dalam pendidikan karena sekolah merupakan ujung tombak yang menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pendidikan. Permasalahannya adalah tidak semua sekolah mampu merespon dan melaksanakan semua kebijakan tersebut dengan baik. Hal ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki oleh setiap sekolah berbeda-beda.

Modal sosial juga merupakan sejumlah sumber daya nyata yang ada pada individu atau kelompok yang memiliki jaringan berupa hubungan timbal balik, perkenalan dan pengakuan yang tercipta dalam suatu kelompok yang melembaga dalam jangka panjang. Modal sosial adalah sumber daya karena melibatkan harapan timbal balik, dan jaringan hubungan yang lebih luas dengan kepercayaan tinggi dan nilai-nilai bersama dipupuk oleh individu di mana pun. (Bourdieu dan Wacquant, 1992: 119 dalam Field, 2010: 23-32).

Kota Padang yang menjadi percontohan kemajuan pendidikan khususnya pada tingkat SMA membuat SMA di Kota Padang menjadi pusat perhatian dan icon bagi sekolah-sekolah di daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Keterbatasan alokasi dana dari pemerintah terlebih sejak dulu perhatian pemerintah lebih besar kepada pemerataan sarana dan prasarana sekolah di daerah 3 T (terdepan, terpencil dan tertinggal) sehingga SMA di Kota Padang harus lebih aktif dalam mencari peluang bantuan peningkatan sarana dan prasarana untuk perkembangan kemajuan pendidikan terutama pada sekolah penggerak.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan ditemukan bahwa masih banyak sarana dan prasarana pada sekolah penggerak di Kota Padang tersebut yang kurang memadai. Fasilitas pendidikan seperti ruangan kelas yang sudah memerlukan rehabilitasi, Gedung penunjang pembelajaran yang masih kurang seperti laboratorium, sanitasi, ruangan ekstrakurikuler dan lainnya serta alat praktek dan peraga peserta didik yang masih belum memenuhi syarat untuk menerapkan program kurikulum merdeka yang sudah diwajibkan dilaksanakan oleh sekolah penggerak tersebut.

Pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana inilah yang menjadi tugas berat pada sekolah penggerak untuk menerapkan berbagai program dan kebijakan pemerintah sementara anggaran yang bersumber dari sekolah tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana yang sangat besar. Anggaran dana pengelolaan sekolah bersumber dari Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah sebagai bantuan operasional sekolah, akan tetapi anggaran tersebut tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dikarenakan sudah ada ketentuan atau juknis yang mengatur tentang peruntukan penggunaan dana tersebut.

Hal inilah yang menyebabkan kepala sekolah selaku pengelola satuan pendidikan di sekolah harus lebih proaktif dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tersebut. Melalui modal sosial seseorang atau kelompok dapat lebih mudah mencapai tujuan yang ingin dicapai, karena tanpa adanya modal sosial upaya yang dilakukan justru akan menjadi lebih sulit. Hal ini dikarenakan modal sosial bersifat produktif, tanpa modal sosial seseorang akan lebih sulit untuk memperoleh keuntungan secara material maupun keberhasilan yang optimal (Santoso, 2020: 2).

Dalam mengkaji mengenai pemanfaatan dan efektifitas modal sosial sebelumnya juga pernah dilakukan penelitian oleh Wira Nurmalia (2017) mengenai pemanfaatan modal sosial sebagai strategi bertahan hidup komunitas terdampak pembangunan pada penarik ketek di Kota Jambi, penelitian ini mendeskripsikan mengenai strategi yang digunakan oleh penarik ketek yang terdampak oleh pembangunan jembatan di Kecamatan Pelayangan yang berpengaruh kepada

pendapatan ekonomi mereka. Pendapatan ekonomi yang menurun membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup ditengah kebutuhan yang mulai meningkat sehingga mereka mencari cara untuk dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan beragam modal sosial salah satunya adalah modal sosial. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa strategi bertahan hidup penarik ketek tersebut ternyata diperoleh dari pemanfaatan modal sosial yang terbagi menjadi tiga komponen yang saling mendukung yaitu kepercayaan, jaringan dan norma. Pemanfaatan komponen modal sosial tersebut ternyata efektif mampu menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jembatan pelayangan sehingga penarik ketek tersebut dapat bertahan hidup dan menyelesaikan persoalan ekonomi mereka.

Selain itu penelitian mengenai modal sosial juga pernah dilakukan oleh Muhammad Fadli (2020) mengenai Peran modal sosial dalam pendidikan di sekolah. Penelitian tersebut mendeskripsikan mengenai permasalahan dalam proses perbaikan kualitas sekolah. Peneliti melihat bahwa sekolah awalnya kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan terkait perbaikan kualitas sekolah. Peneliti melihat adanya kecenderungan bahwa sekolah masih belum menyadari dan menganggap penting keberadaan modal sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai strategi yang dapat dikembangkan dalam pola-pola hubungan sosial yang terjadi dalam proses belajar baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat ataupun sekolah. Kesulitan dalam memperbaiki kualitas sekolah inilah yang kemudian menjadi perhatian bagi sekolah mengenai penerapan strategi perbaikan yang salah satunya adalah dengan menggunakan modal sosial. Hasil penelitian menjelaskan bahwa modal sosial sangat efektif digunakan dalam memperbaiki kualitas sekolah apabila mampu mengembangkan dan mempertahankan unsur-unsur modal sosial itu sendiri sehingga peran modal sosial akan nampak apabila pihak sekolah mampu membangun dan mengembangkan kepercayaan, nilai dan norma, jaringan sosial, kerjasama dan partisipasi dalam rangka untuk meningkatkan perbaikan sekolah.

Penelitian lainnya mengenai modal sosial juga dilakukan oleh Atika Marwa (2018) mengenai pemanfaatan modal sosial sebagai strategi yang dilakukan oleh pedagang sekitar kalijodo pasca penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah. Penggusuran berdampak pada keseimbangan ekonomi para pedagang di pasar

kalijodo. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk jaringan sosial di pasar Jembatan Dua dengan warga Kalijodo sebelum dan sesudah penggusuran di Kalijodo dan menjelaskan penggunaan norma, kepercayaan dan jaringan sosial yang digunakan pedagang pasar untuk meningkatkan penjualan. Hasil penelitian mengungkapkan pedagang sukses memulihkan keseimbangan pasar dengan memanfaatkan modal sosial yang mereka bangun.

Dari penelitian sebelumnya mengenai modal sosial dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan modal sosial efektif mampu digunakan dalam berbagai upaya penyelesaian berbagai persoalan ekonomi maupun sosial. Unsur modal sosial seperti kepercayaan, nilai dan norma serta jaringan dapat menjadi produktif jika mampu di dayagunakan dengan baik.

Penelitian ini dilakukan berawal dari dugaan bahwa kepala sekolah memiliki sumber daya sosial yang digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan perolehan bantuan peningkatan sarana dan prasarana. Hal ini karena sumber bantuan yang diterima oleh masing-masing sekolah memiliki variasi yang sangat mencolok, seperti SMAN 9 Padang yang mendapatkan bantuan dari berbagai sumber seperti dari pikir anggota adewan, kemendikbud, alumni, orang tua siswa (komite), CSR, dan lainnya, SMAN 13 Padang yang hampir 99% bantuan diterima bersumber dari dana pikir anggota dewan, dan SMAN 15 Padang yang hampir 97% bantuan yang diterima bersumber dari bantuan pusat yakni Kementerian Pendidikan.

Adanya variasi sumber perolehan bantuan yang diterima oleh masing-masing sekolah dengan perbedaan yang sangat signifikan tersebutlah membuat peneliti memiliki dugaan bahwa ada kekuatan modal sosial yang mempengaruhinya. Inilah yang mendasari alasan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Pemanfaatan modal sosial dalam upaya peningkatan sarana prasarana SMA Penggerak di Kota Padang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Keberhasilan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh banyak aspek, salah satunya adalah ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dan memadai. Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya utama dan sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah terutama pada sekolah penggerak yang notabene sebagai fasilitator dan motivator peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.

Fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai pada sekolah penggerak sementara tuntutan tugas dan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah dalam program sekolah penggerak membuat sekolah terutama kepala sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai program kebijakan tersebut. Keterbatasan sumber dana yang berasal dari dana sekolah yaitu BOS yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana membuat kepala sekolah harus berupaya keras untuk mencari bantuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah juga sangat terbatas, sehingga membuat sekolah harus berlomba-lomba untuk mengupayakan agar sekolah mereka termasuk dalam daftar sekolah penerima bantuan yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang akan di anggarkan pada alokasi tahun berjalan.

Kebutuhan akan peningkatan sarana dan prasarana sekolah inilah yang membuat kepala sekolah mencari berbagai sumber bantuan yang bisa mereka dapatkan dengan menggunakan berbagai upaya dan strategi agar sekolah mereka selalu masuk dalam usulan penerima bantuan. Keberhasilan dalam peningkatankualitas sekolah terutama yang terkait dengan keberadaan sarana dan prasarana membutuhkan modal sosial. Dari berbagai penelitian membuktikan bahwa perbaikan mutu dan kualitas sekolah sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial. Dalam hal ini modal sosial dianggap mampu mengubah berbagai kebijakan dan keputusan dalam penentuan pemilihan penerimaan bantuan yang akan di berikan. Hubungan sosial yang kuat dengan pihak pemberi bantuan merupakan investasi yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin menemukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengelolaan dan peningkatan sarana dan prasarana?
2. Bagaimana kepala sekolah menggunakan modal sosial untuk memperoleh bantuan peningkatan sarana dan prasarana?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan modal sosial sebagai upaya yang digunakan kepala sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengelolaan dan peningkatan sarana dan prasarana di sekolah.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk modal sosial yang digunakan sebagai upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana SMA di Kota Padang khususnya pada 3 sekolah penggerak di Kota Padang yakni SMAN 9 Padang, SMAN 13 Padang dan SMAN 15 Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian diharapkan dapat membawa manfaat dari berbagai segi baik secara akademis maupun praktis, sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Penelitian diharapkan mampu memberikan memberikan sumbangan atau referensi terhadap perkembangan pengetahuan mengenai permasalahan dalam dunia pendidikan khususnya permasalahan terkait pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau sumber perbaikan bagi peneliti dan pihak lain yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut dikarenakan cakupan penelitian yang masih terbatas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bahan informasi untuk Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan terutama dalam pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.
2. Diharapkan mampu menjadi acuan bagi kepala sekolah untuk dapat membangun dan mempertahankan modal sosial dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di sekolah terutama terutama terkait sarana dan prasarana.

